

BAB V

KESIMPULAN

Skripsi ini berjudul “Seragam Hitam dan Beringin: Keterlibatan Jawara dalam Politik Golkar di Banten 1971-1997”. Jawara merupakan entitas khas masyarakat Banten, terutama di Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lebak. Istilah jawara, meskipun sangat problematis, tapi pada umumnya merujuk pada sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang dipercaya memiliki keunggulan fisik, berilmu magis dan memiliki keberanian. Keberanian dan keunggulan fisik inilah yang menjadi ciri khas dari karakter jawara. Secara historis, keberadaan jawara dalam struktur masyarakat Banten, sudah ada semenjak pendirian Kesultanan Banten dan semakin signifikan kedudukan dan peranannya setelah Kesultanan Banten dianeksasi oleh Kolonial Belanda. Pada masa ini bersama kiai, jawara kemudian menjadi elit revolusi yang mampu untuk menggerakkan massa menentang penjajahan. Kegigihan kedua elit masyarakat ini, menimbulkan kesan positif dalam masyarakat, sehingga ada yang menganggap mereka sebagai pahlawan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pergantian penguasa pemerintahan dari kesultanan ke Kolonial Belanda, secara langsung mengubah tatanan hidup dan stratifikasi sosial dalam masyarakat Banten, terutama bagi para jawara. Ketika masa kesultanan, stratifikasi sosial yang berdasarkan pada garis keturunan, memunculkan sistem hierarki yang bersifat tertutup sehingga tidak memberikan kesempatan bagi kelas bawah stratifikasi untuk menaikkan status mereka termasuk kelompok jawara. Kondisi ini kemudian berubah ketika masa penjajahan, kehidupan masyarakat yang kacau sebagai akibat kebijakan komersialisasi dan kapitalisasi pertanian oleh pemerintah kolonial, secara tidak langsung memunculkan kelompok jawara sebagai sebuah kekuatan politik yang diperhitungkan. keberadaan jawara pada waktu itu

mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, kemudian dijadikan sebagai pemimpin, baik pemimpin formal (*lurah*) maupun informal (lembaga adat). Oleh sebab itu, secara bertahap para jawara mengalami mobilitas dalam hierarki sosial, mereka kini tidak lagi menjadi kelompok bawah dalam sistem stratifikasi masyarakat pribumi, melainkan sudah menjadi kelompok elit yang memiliki kekuasaan, pengaruh dan turut menentukan kebijakan. Pengaruh tersebut semakin besar setelah jawara terlibat dalam politik Golkar pada masa Orde Baru.

Sebagai kelompok elit yang berpengaruh, tentu saja jawara akan menempati posisi atau kedudukan strategis dalam struktur kehidupan masyarakat mereka yang masih relatif tradisional. Posisi strategis itu biasanya dengan menjadi *lurah* (pemimpin formal) maupun pemimpin *kaolotan*, guru persilatan, guru ilmu magis, guru kesenian dan lain-lain (informal), sehingga terlihat posisi mereka terlihat sentral sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan masyarakat akar rumput (sebagian besar dari jumlah masyarakat). Kedudukan-kedudukan tersebut jika dilihat dari segi politik, tidak terlepas dari kepemilikan sumber kekuasaan berupa magis, kekuatan fisik, ekonomi dan status sosial oleh para jawara yang pada akhirnya mampu membangkitkan perasaan orang lain dengan rasa tunduk dan patuh terhadap perintah jawara. Selain hal tersebut, nilai-nilai kejawaraan yang *kukuh kana jangji* (komitmen kuat) dan *leber wawanen* (semangat militansi yang tinggi), memunculkan jaringan dan ikatan kuat, sehingga memudahkan mereka untuk mengembangkan loyalitas di antara sesama jawara maupun dengan pemimpin mereka. Oleh sebab itu, siapa pun yang mampu mendekati dan memanfaatkan potensi adat jawara ini, maka dia akan mampu untuk menguasai perpolitikan di Banten.

Kondisi tersebut di atas ternyata mampu dibaca oleh Pemerintah Orde Baru, Soeharto sangat memahami betul potensi jawara sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh signifikan dalam masyarakatnya selain kiai. Oleh karena itu, Orde Baru kemudian berusaha merangkul kelompok jawara dan ulama ke dalam politik Golkar, hal itu diwujudkan melalui prinsip kekaryaan. Prinsip kekaryaan yang dimaksud adalah mewadahi potensi jawara dalam sebuah organisasi bernama Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia (PPPSBBI). Selain itu, Orde Baru juga merangkul organisasi TTKKDH yang memiliki cabang-cabang *perguron* di seluruh wilayah Banten serta ulama NU yang diwadahi dalam organisasi Satkar Ulama. Dengan berhasil dikaryakannya potensi adat Banten ini, maka terjadi hubungan simbiosis antara Pemerintah Orde Baru dengan jawara Banten. Hubungan simbiosis itu terlihat dengan adanya dukungan *all out* jawara terhadap politik Golkar yang direalisasikan dalam upaya memenangkan Golkar dalam setiap kali pemilu. Sementara itu, Orde Baru (pemerintah) memberikan ruang yang cukup leluasa kepada para jawara untuk mengembangkan ekonomi, bisnis dan politik di Banten sehingga mereka mampu untuk menjadi “penguasa” Banten.

Dukungan jawara terhadap politik Golkar di Banten, diwujudkan dalam berbagai upaya yang dilakukan, baik secara persuasif maupun keorsif. Upaya-upaya itu antara lain dengan memanfaatkan hubungan patron-klien antara pemimpin jawara dengan anak buahnya dan antara guru dengan muridnya. Selain itu, juga memanfaatkan peran dan kedudukan mereka sebagai pemimpin, baik pemimpin adat maupun pemimpin formal seperti menjadi ketua *kaolotan* dan *lurah*. Melalui kedudukan yang berhubungan langsung dengan masyarakat bawah inilah, mereka bisa mempengaruhi massa dan mengumpulkan dukungan kepada

Golkar, sehingga OPP berwarna kuning ini, berhasil mengungguli perolehan suara di Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lebak. Selain hal tersebut, tentunya yang tidak dapat diabaikan kontribusinya yaitu pemanfaatan jaringan sosial kejawaraan seperti kekerabatan, hubungan *saguru-saelmu* dan organisasi kejawaraan. Melalui jaringan-jaringan yang tersebar di seluruh jawara Banten inilah, pada akhirnya jawara mengembangkan loyalitas dan komitmen mereka untuk membesarkan Golkar, maka tidak mengherankan jika ada ungkapan dalam masyarakat yang mengatakan “Golkar merupakan partainya jawara”.

Bagi Orde Baru, keterlibatan jawara dalam politik Golkar merupakan jaminan bagi tercapainya cita-cita untuk menguasai perpolitikan di wilayah Banten yang masih didominasi partai-partai Islam pada Pemilu 1955. Hal demikian itu, tentu saja sangat wajar mengingat di wilayah Banten, selain jawara, kiai juga merupakan kelompok elit yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur kehidupan masyarakat, sehingga perkataan maupun perbuatan kiai diikuti oleh masyarakat dengan penuh rasa segan dan hormat. Selain itu, kiai juga memiliki jaringan yang tersebar luas melalui pesantren, murid-murid maupun masyarakat di sekitarnya, sehingga para kiai Banten yang pada umumnya lebih memilih partai Islam sebagai pandangan politiknya, memiliki andil dalam menentukan dan mengarahkan partai politik yang harus dicoblos oleh masyarakat di sekitarnya dan tentu saja masyarakat akan di arahkan ke partai Islam (PPP).

Berawal dari kondisi perpolitikan di atas, maka cita-cita politik Golkar yang terhalang oleh partai Islam itu, hanya bisa disiasati dengan melakukan pendekatan terhadap pihak lain yang juga memiliki pengaruh, jaringan dan kedudukan yang kuat dalam masyarakat, pihak lain itu tidak lain adalah kelompok jawara. Dengan sifat jawara yang lebih cenderung

pragmatis dan dengan budaya politik *kaula*, maka tidak mengherankan jika kemudian kelompok jawara cenderung lebih membela penguasa daripada mengikuti kiai. Oleh sebab itu, keberadaan jawara setidaknya memberikan pengaruh bagi kesuksesan pemilu Golkar di wilayah-wilayah Banten.

Dengan memanfaatkan pola hubungan patron-klien antara tokoh jawara dengan anak buahnya, juga dengan kepemilikan sumber kekuasaan berupa kedudukan, kekuatan fisik dan ekonomi, para jawara menggalang dukungan bagi Golkar yang terentang sampai masyarakat bawah. Wujud dari dukungan itu, dapat dilihat dari hasil penghitungan suara dalam pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Pada masa-masa pemilu tersebut, secara umum menunjukkan bahwa Golkar senantiasa dapat mendominasi hasil perolehan suara Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lebak, meskipun hasil perolehan suara Golkar mengalami jumlah yang fluktuatif dari waktu ke waktu pemilu.

Kondisi demikian di atas tentunya sangat wajar, karena tidak setiap kali ucapan dan perintah jawara didengar oleh masyarakatnya, selain itu masyarakat Banten yang terkenal dengan kereligiusannya pada waktu itu (masa Orde Baru), mau tidak mau menjadikan partai Islam (PPP) sebagai tantangan yang serius bagi politik Golkar. Namun, tantangan itu kemudian berhasil diminimalisir antara lain dengan mengeluarkan kebijakan asas tunggal, penghapusan lambang-lambang keagamaan dan kebijakan politik masa mengambang. Akan tetapi, dari semua kebijakan itu, yang lebih penting kontribusinya, yaitu adanya kerjasama antara pemerintah dan kelompok elit lokal Banten yaitu jawara (termasuk jawara-kiai), sehingga Golkar bisa memonopoli perolehan suara pada Pemilu 1997, dengan memperoleh lebih dari 80% di Kabupaten Serang dan Pandeglang.